**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adat istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
 - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan faktor yang strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat Banggai.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Seri D Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 40 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D Nomor 12);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai, norma dan kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

9. Adat Banggai adalah adat banggai yang meliputi adat banggai, adat balantak dan adat saluan serta adat lainnya yang telah ada dan diakui oleh masyarakat adat.
10. Kebiasaan – kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh masyarakat lainnya.
11. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
12. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan.
13. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
14. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.
15. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Bagian Pertama Mekanisme

Pasal 2

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama antara lembaga adat dengan :

- a. Bupati untuk di wilayah Kabupaten;
- b. Camat untuk di wilayah Kecamatan;
- c. Kepala Desa / Lurah di wilayah Desa / Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah – langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pemuka-pemuka Adat.

- (2) Kebijakan dan atau langkah – langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang – undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemuka – pemuka adat di daerah.

Pasal 4

Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya :

- a. Sikap demokratis adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai Budaya Daerah lain dan asing yang positif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsunagn pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) pemberdayaan adat istiadat bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada peningkatan tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial.
- (2) Pelestarian adat istiadat bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (3) Pengembangan adat istiadat bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga adat serta dapat melestarikan adat istiadat di desa guna menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB III

LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah atau organisasi permusyawaratan/permufakatan pemangku adat / ketua adat / Tetua adat dan pemuka pemuka adat lainnya yang berada diluar organisasi pemerintah.

Pasal 8

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada Pemerintah;
- b. Menyelesaikan permasalahan adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat di wilayahnya;